

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 5 minggu sejak tanggal 18 April 2024 hingga 21 Mei 2024 adalah:

1. Calon apoteker dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Calon apoteker harus selalu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan nilai Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

Saran bagi mahasiswa calon apoteker setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 5 minggu sejak tanggal 18 April 2024 hingga 21 Mei 2024 adalah:

1. Mahasiswa calon apoteker harus aktif bertanya dalam melaksanakan PKPA serta berdiskusi dengan pembimbing agar

2. mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker harus percaya diri dan berinisiatif untuk berkomunikasi dengan pasien dan didampingi oleh apoteker terutama pada saat memberikan pelayanan informasi obat, konseling dan swamedikasi.
4. Mahasiswa calon apoteker mampu mempelajari berbagai macam obat berdasarkan kelas terapi, cara penggunaan dan lain sebagainya agar dapat menunjang pelayanan kefarmasian yang lebih baik kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF 76, 2019, BNF March-September 2021, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Brayfield, A., 2014, Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition. Pharmaceutical Press.
- Katzung, B. G. 2015. Basic & Clinical Pharmacology. 13th Edition. Mc GrawHill
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

- Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi,
- Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- McEvoy, G. K., 2011, AHFS Drug Information Essentials, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. 2021, Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia 2021, PERKENI, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 1997. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2023. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Republik Indonesia, Jakarta